

Daftar Isi
Jurnal **Masyarakat dan Budaya**
Volume 20 No. 3 Tahun 2018

	Halaman
Pengantar Redaksi	iii
Topik:	
☞ Akses dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Lokal di Kabupaten Manokwari <i>Robert Siburian</i>	297
☞ Strata Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Berbasis Komunitas: Studi Kasus PNPM/RESPEK di Kabupaten Merauke <i>Paulus Rudolf Yuniarto</i>	313
☞ Menancapkan Tiang-Tiang “Kayu Besi”: Adat dan Siasat Para Elit di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat <i>I Ngurah Suryawan</i>	329
☞ <i>Language and Religion: The Use Of Language In Christian Liturgy in Some Border Areas of Indonesia</i> <i>Fanny Henry Tondo</i>	347
☞ <i>The Invention of Territories and Hopes in The Era Of Ecotourism in West Papua</i> <i>Hatib Abdul Kadir</i>	361
☞ Papua dalam Media: Analisis <i>Framing</i> Pemberitaan Otonomi Khusus di Papua Barat <i>Efa Rubawati</i>	375
☞ Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan, dan Ketahanan Orang Asli Papua <i>Cahyo Pamungkas & Devi Triindriasari</i>	391
☞ Kehidupan Orang Asli Papua di Distrik Tiom Setelah Pemekaran Kabupaten Lanny Jaya <i>Yannice Luma Marnala Sitorus</i>	407
Tinjauan Buku:	
☞ Papua Dari Masa Ke Masa: “Zaman Batu” Hingga Masa Kini <i>Anggy Denok Sukmawati</i>	425

PENGANTAR REDAKSI

Lintasan sejarah Papua yang sarat dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi, dari fase kolonial hingga reformasi Indonesia, telah menjadi potret lengkap dari sebuah wilayah pinggiran, perbatasan, dan pedalaman diperlakukan oleh kekuasaan. Kekuasaan yang ada bukan hanya kekuasaan atas nama negara, tetapi juga kekuasaan atas nama kekuatan di luar negara. Perusahaan tambang seperti Freeport dan perusahaan *logging* yang tersebar di berbagai daerah ikut berperan aktif dalam “memiskinkan” dan “menyejahterahkan” kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini belum ditambah dengan relasi kuasa dan tarik menarik berbagai kepentingan antara negara dan pihak-pihak di luar negara yang didukung oleh kekuatan negara lain. Hampir semua problema sosial kemasyarakatan dan kebudayaan, serta ekonomi, politik, dan keamanan semuanya ada di sana.

Wilayah Papua yang membentang luas itu sesungguhnya telah memenuhi tiga klasifikasi wilayah “marginal”, yaitu pinggiran, pedalaman, dan perbatasan. Tiga klasifikasi daerah itu yang hendak diperjuangkan pengentasannya oleh Presiden Joko Widodo, dan menawarkan kesejahteraan sosial ekonomibagi masyarakat Papua. Melalui pembangunan jalan Trans-Papua sepanjang 4.000 kilometer, pembangunan pedesaan dan permukiman, pembenahan kawasan perbatasan, penghilangan disparitas harga yang tinggi atas kebutuhan pokok dan BBM, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan adalah upaya pemerintah untuk memberikan dan meningkatkan akses kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur dan dilanjutkan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia digenjot selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harapannya, kerentanan, kemiskinan, dan lemahnya daya saing masyarakat Papua dibandingkan masyarakat di provinsi lain di masa-masa sebelumnya dapat dikurangi jaraknya, dan bahkan bisa dihilangkan. Upaya serius Pemerintah Indonesia itu seolah ingin mendorong bangunan imaji bahwa keberhasilan pembangunan Papua menjadi *totem phrase toto* keberhasilan Indonesia secara keseluruhan.

Namun, realitasnya, “pembangunan” yang selama ini dilakukan masih kurang maksimal menyentuh semesta rakyat Papua. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di bumi Cendrawasih di satu sisi akan menghilangkan berbagai identitas kebudayaan kelompok-kelompok etnik di dalamnya. Di sisi lain, masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton dari arus globalitas yang dibawa secara bersama seiring pembangunan infrastruktur. Pertanyaannya, bagaimana kontestasi ruang-ruang lokalitas dengan globalitas dalam akses, identitas dan partisipasi sosial budaya masyarakat seiring pembangunan infrastruktur wilayah Papua? Permasalahan ini dijawab dengan lugas oleh beberapa tulisan yang disajikan dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) edisi khusus tahun 2018.

Dari keseluruhan tulisan yang ada, dapat dipetakan limatema permasalahan yang diangkat oleh tulisan-tulisan yang terbit pada JMB Vol.20 No. 3 Tahun 2018 ini. *Pertama*, permasalahan tentang dinamika dan partisipasi sosial budaya dalam proses pembangunan. Aspek ini terlihat pada tiga tulisan. Tulisan pertama berjudul “Akses dan Pengelolaan Sumberdaya Hutanpada Masyarakat Lokaldi Kabupaten Manokwari”, yang ditulis oleh Robert Siburian. Tulisan ini memberikan gambaran tentang hutan yang menjadi pusat gravitasi kebudayaan di satu sisi dan pusat *livelihood system* di sisi lain. Untuk kedua fungsi tersebut, setiap anggota masyarakat berkewajiban menjaga hutan adatnya. Sayangnya tarik menarik kepentingan dengan perusahaan pun jelas terlihat pada fase perkembangannya. Tulisan kedua berjudul “Strata Sosial dan Partisipasi Masyarakatdalam Program Pembangunan Berbasis Komunitas: Studi kasus PNPM/RESPEK di Kabupaten Merauke”. Paulus Rudolf Yuniarto berusaha menjelaskan bahwa kelompok strata sosial pada lapisan masyarakat atas (elit kampung dan pengurus) mendominasi jalannya program—dari tingkat perencanaan hingga implementasi program—dan menjadi perwakilan harapan-harapan yang muncul dari kelompok lapisan bawah (marga kecil/kelompok perempuan/non-elit). Lapisan bawah masyarakat yang sebagian besar masih bekerja berburu (meramu) tidak mudah ikut berpartisipasi memberikan usulan atau kerja, kecuali di-imingi imbalan sejumlah uang. Akhirnya, kegiatan PNPM/Respek pun hanya sekadar mendukung kekuasaan kelompok elitnya. Tulisan ketiga yang berkesesuaian dengan tema ini adalah

“Menancapkan Tiang-Tiang ‘Kayu Besi’: Adat dan Strategi Para Elit di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat” yang ditulis oleh I Ngurah Suryawan. Ia menjelaskan relasi kuasa kelompok elite yang berusaha mendorong dan menjaga partisipasi anggota kelompoknya untuk pembangunan dan pemertahanan atas hak-hak ulayatnya.

Kedua, tema pemenuhan hak ekonomi sosial budaya ditengah keterbatasan akses. Tema tulisan ini diisi oleh Fanny Henri Tondo tentang pemakaian bahasa dalam liturgi Kristen pada beberapa daerah perbatasan, menjadi ulasan menarik tentang pemenuhan hak sosial masyarakat di wilayah perbatasan seperti Papua. Penggunaan bahasa daerah pada khutbah dan nyanyian koor, sebagai rangkaian dari ibadah yang bersifat transenden, merupakan bukti bahwa masyarakat adat masih diperkenankan dalam penggunaan bahasa ibunya.

Sementara tema *ketiga* tentang Infrastruktur: Antara Pembangunan dan Ancaman Kepunahan Keragaman Identitas, diisi oleh Hatib Abdul Kadir dengan tulisan “Invensi Teritorial dan Harapan di Era Ekoturisme di Papua Barat”, menjelaskan bahwa ranah bawah dalam merespons status dan kebijakan baru berkenaan dengan konservasi alam. Masyarakat Raja Ampat menciptakan teritorinya masing-masing berdasarkan memori mereka tentang tempat nenek moyang. Tujuannya adalah bukan saja untuk merawat alam dan tradisi, tetapi yang tak kalah penting adalah agar mereka terintegrasi dengan pasar.

Untuk menunjang pemahaman tentang Papua secara mendalam, yang muncul dalam tema *keempat* tentang kontestasi kebudayaan lokal versus global Pra dan Pasca Pembangunan, secara umum dapat diberikan jawabannya melalui tulisan “Papua dalam Media: Analisis Framing Pemberitaan Otonomi Khusus di Papua Barat”. Tulisan ini memaparkan konstruksi realitas yang dilakukan oleh media, menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman terhadap *Radar Sorong* dan *Antara Papua Barat*. Konstruksi realitas Papua dalam media terhadap pemberitaan otonomi khusus terjadi karena faktor kepentingan ekonomi dan politik, hegemoni media dan rezim representasi serta pengaruh strukturasi dalam sebuah institusi media.

Tema *kelima* yang tidak kalah menarik adalah strategi sosial budaya pemertahanan beragam identitas kebudayaan. Tema ini secara utuh dibahas dua tulisan. Tulisan Cahyo Pamungkas dan Devi Triindriasari melalui “Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan, dan Ketahanan Orang Asli Papua” adalah salah satu tulisan yang mengangkat tema tersebut. Walaupun tulisan ini terlihat “politik”, tetapi di dalamnya dipenuhi dengan data dan analisis mengenai eksistensi dan kontestasi dari identitas kebudayaan. Penggunaan politik identitas dalam pilkada di Papua memperkuat atau memperlemah tata kelola pemerintahan dan ketahanan orang asli Papua pada masa mendatang. Setelah Otsus, identitas kesukuan menguat kembali mengalahkan ke-Papua-an dalam ranah baru politik lokal. Sebagai akibatnya, Pemilu ditempatkan sebagai strategi dan siasat elite untuk memperebutkan sumber daya daripada membangun tata kelola pemerintahan dan meningkatkan ketahanan orang asli Papua.

Argumen yang diangkat dalam tulisan Cahyo dan Devi tersebut semakin terang ketika tulisan “Kehidupan Orang Asli Papua di Distrik Tiom Setelah Pemekaran Kabupaten Lanny Jaya” yang ditulis oleh Yannice Luma Marnala Sitorus disajikan. Menurut amatannya, ada perubahan sosial, budaya dan ekonomi orang asli Papua di Tiom setelah 9 tahun pembangunan yang intensif di sana, khususnya sejak pemekaran Kabupaten Lanny Jaya dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008. Sayangnya, sampai sekarang mereka belum berada pada tingkat peradaban yang setara dengan kelompok masyarakat pendatang di sana. Pembangunan di sana masih belum banyak meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua terutama yang berada di wilayah pegunungan tengah di Papua.

Delapan tulisan yang mengisi lima tema di atas telah menyimpulkan bahwa dengan pembangunan yang ada sebenarnya telah menghasilkan perubahan yang cukup baik dari fase sebelumnya. Namun, pembangunan itu belum secara maksimal meningkatkan kesejahteraan dan akses kesejahteraan, walaupun di sisi lain ada penguatan dalam politik identitasnya. Akhirnya, tema utama edisi khusus Papua: akses, identitas dan partisipasi sosial budaya ditutup dengan baik oleh Anggy Denok Sukmawati yang memberikan resensi buku *From ‘Stone-Age’ to ‘Real-Time’ Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities* karya Martin Slama dan Jenny Munro (ed.). Buku ini secara umum menyoroiti beberapa masalah yang muncul di Papua yang masuk ke dalam wilayah

Indonesia, khususnya pada aspek-aspek akses kesejahteraan, pelemahan dan penguatan politik identitas, dan keterlibatan orang Papua sendiri dalam proses pembangunan yang ditawarkan oleh negara dan aktor lainnya. Pada akhirnya, membahas Papua beserta kebudayaannya tidak pernah bisa habis dan tidak bisa berada pada satu titik kesimpulan yang sama.

M. Alie Humaedi

Jurnal Masyarakat dan Budaya

Volume 20 No. 3 Tahun 2018

AKSES DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN PADA MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN MANOKWARI

Robert Siburian

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
robertsdes1970@gmail.com

Abstrak

Hutan merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Manokwari. Sebagai bagian dari masyarakat tradisional, hutan menjadi tempat hidup, tempat mencari makan, tempat bermain, dan tempat belajar. Dengan kata lain, hutan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus tempat terjadinya proses sosial budaya. Agar manfaat itu terwujud seiring keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan, akses masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan menjadi penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal dapat mengambil manfaat dari hutan melalui partisipasi mereka mengikuti program pemerintah dan mereka juga bisa menerima sejumlah kompensasi. Pengetahuan ekologi tradisional tentang sumber daya hutan harus dilakukan secara terus menerus agar kawasan hutan tetap terjaga. Tulisan ini akan mengangkat hubungan antara hutan dan masyarakat tersebut, praktik pengetahuan ekologi tradisional, dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang dapat memberi pendapatan pada mereka.

Kata Kunci: Akses, Sumber Daya Hutan, Masyarakat Adat, Kearifan Lokal.

STRATA SOSIAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS KOMUNITAS: STUDI KASUS PNPB/RESPEK DI KABUPATEN MERAUKE

Paulus Rudolf Yuniarto

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
rudolfyuniarto@gmail.com

Abstrak

Studi strata (sosial/ekonomi) masyarakat dan hubungan antarstrata dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas jarang dilakukan. Studi ini perlu dilakukan karena memberikan pembelajaran penting tentang: (1) Tata cara dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan publik; (2) Asal pengetahuan sumber-sumber kekuasaan; dan (3) Saling keterkaitan aktor didalamnya. Hasil penelitian dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) pada kelompok masyarakat suku asli Papua di Kabupaten Merauke (Suku Yei dan Suku Marind-anim) memperlihatkan bahwa strata sosial pada lapisan masyarakat atas (elit kampung dan pengurus) mendominasi jalannya program—dari tingkat perencanaan hingga implementasi program—dan menjadi perwakilan harapan-harapan yang muncul dari kelompok lapisan bawah (marga kecil/kelompok perempuan/non-elit). Lapisan bawah masyarakat yang sebagian besar masih bekerja berburu (meramu) tidak mudah ikut berpartisipasi memberikan usulan atau kerja, kecuali di-imingi imbalan sejumlah uang. Oleh karena itu, para pelaksana program yang menjalankan dan menguasai dana bantuan kemudian mengadopsi pola ‘berbagi uang, berbagi ruang’ dalam menjalankan program kegiatan. Demi menghindari perselisihan dengan kelompok masyarakat lain—yang notabene masih satu kerabat/marga—pengurus mengambil jalan tengah dengan mengambil posisi mendekati para elit kampung dan pendamping program untuk menyerap ide dan dana program. Dampak ikutan dari pola ini adalah sulit terwujudnya penguatan kapasitas masyarakat pada seluruh strata sosial yang ingin dicapai oleh program PNPB/RESPEK.

Kata Kunci: Partisipasi, Strata Sosial, Pemberdayaan Masyarakat.

MENANCAPKAN TIANG-TIANG "KAYU BESI": ADAT DAN SIASAT PARA ELIT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI, PAPUA BARAT

I Ngurah Suryawan

Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua
ngurahsuryawan@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan bagaimana “adat” dijadikan sebagai modal sosial untuk kontestasi ekonomi politik oleh para elit di Kabupaten Teluk Bintuni. Konteks yang melatarbelakanginya adalah relasi masyarakat lokal—khususnya komunitas Sebyar—dengan perusahaan BP (*British Petroleum*). Imajinasi tentang tiang-tiang “kayu besi” yang menjadi simbol pondasi rumah masyarakat di kampung-kampung, kini mulai terlihat rapuh. Transformasi sosial tersebut pada awalnya terjadi saat masyarakat menyerahkan tanahnya ke perusahaan. Ketergantungan kehidupan ke depan menjadi sesuatu yang mutlak saat sumber-sumber penghidupan ekonomi telah hilang. Artikel ini berargumentasi bahwa wacana tentang masyarakat adat menyeret berbagai macam kepentingan, terkhusus adalah para elit masyarakat adat itu sendiri untuk kepentingan ekonomi politiknya. Menyandarkan pada dinamika yang terjadi pada satu bagian dari masyarakat adat Teluk Bintuni, artikel ini meyakini bahwa perlahan-lahan tiang-tiang kayu besi yang menjadi pondasi solidaritas sosial mulai rapuh. Kerapuhannya tergerogoti oleh pragmatisme yang dipentaskan oleh para elit dan kemudian ditiru oleh masyarakatnya sendiri.

Kata Kunci: Adat, Modal Sosial, Elit, Transformasi, Solidaritas Sosial, Pragmatisme

LANGUAGE AND RELIGION: THE USE OF LANGUAGE IN CHRISTIAN LITURGY IN SOME BORDER AREAS OF INDONESIA

Fanny Henry Tondo

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
fhtondo@yahoo.com

Abstract

In sociolinguistic perspective, the language use could be studied in various domains. One of them is religious domain. The use of language in religious practice, in this case Protestant Christianity in areas where the research location is relatively uniform from one place to another. Bahasa Indonesia (BI) is the dominant language in all liturgy elements. In six areas studied Indonesian hegemony is very strong, not only on state activities and education, but also on religious activities, especially Protestant Christianity. Meanwhile, local languages fill only a few liturgical elements within a limited scope, i.e. at 'sermons' and 'chants and choirs'. In some cases, however, the use of local languages can occur during most of these religious occasions, for example in the ceremony of thanksgiving (new gratefulness of the rice). This paper aims to explain the language use in Christianity, especially in some churches in some border areas of Indonesia namely in Alor (East Nusa Tenggara), South Sorong (West Papua), Halmahera (North Maluku), Nunukan-Sebatik (North Kalimantan), Enggano (Bengkulu), and Banda Aceh (Aceh). The data provided is based on the field researches during 2005 – 2014 (for the areas of Alor, South Sorong, Halmahera, dan Nunukan-Sebatik) and it has been enriched by related current secondary data. Meanwhile, on Enggano and Banda Aceh use respectively the data collected in 2015 and 2016.

Keywords: language, sociolinguistics, religion, Christianity liturgy, church, border area.

THE INVENTION OF TERRITORIES AND HOPES IN THE ERA OF ECOTOURISM IN WEST PAPUA

Hatib Abdul Kadir

Departemen Antropologi, Universitas Brawijaya
hatibabdulkadir@ub.ac.id

Abstract

This paper examines people from the bottom in responding new policies on nature conservation. They create their own territory based on the memories about their ancestors. The goal to preserve the nature and culture is even to be more integrated to the market exchanges. The research is conducted in Raja Ampat. A new kabupaten that defines their entire area as a protected place from natural exploitation. This approach is different from the previous treatment to nature of Raja Ampat. To earn cash means to destroy the forest. Rather, through ecotourism, the project expects to give a hope to the people. While preserving the nature, people even can get economic advantage. This paper is based on an ethnographic account. I hiked to the several important spots that also become the place of local people's ancestor. The aim was to get to know people's interaction with the nature and animals. Also, their social relations with other family clan and international NGO's.

Keywords: ecotourism, nature conservation, territory, memory of place, bird watching

PAPUA DALAM MEDIA: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN OTONOMI KHUSUS DI PAPUA BARAT

Efa Rubawati

Universitas Airlangga, Surabaya – Indonesia
rubawatiefa@gmail.com

Abstrak

Konstruksi realitas masyarakat Papua dalam media menghadirkan sebuah realitas yang dianggap sebagai realitas sebenarnya. Realitas media tidak sepenuhnya relevan dengan realitas sebenarnya. *Framing* mempengaruhi pemberitaan permasalahan yang sama, seperti otonomi khusus di Papua Barat. Tulisan ini memaparkan konstruksi realitas yang dilakukan oleh media, menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman terhadap *Radar Sorong* dan *Antara Papua Barat*. Hasilnya menunjukkan *Radar Sorong* menekankan bahwa otonomi khusus di Papua Barat perlu dievaluasi, sedangkan *Antara Papua Barat* cenderung mendukung penerapan otonomi khusus, meskipun dengan penekanan pada skema baru. Konstruksi realitas Papua dalam media terhadap pemberitaan otonomi khusus terjadi karena faktor kepentingan ekonomi dan politik, hegemoni media dan rezim representasi, serta pengaruh strukturasi dalam sebuah institusi media.

Kata kunci: konstruksi realitas, *framing*, media, Papua.

PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA 2018: POLITIK IDENTITAS, TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DAN KETAHANAN ORANG ASLI PAPUA

Cahyo Pamungkas & Devi Triindriasari
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
cahyopamungkas@gmail.com

Abstrak

Indonesia sekarang ini sedang menghadapi gelombang politik identitas, baik di Pusat maupun di daerah. Selama ini, pemilihan kepala daerah sering menjadi arena politik identitas, baik oleh kelompok yang dominan maupun yang ter subordinat, terutama dengan menggunakan isu agama. Kebanyakan pengamat politik identitas memfokuskan kajian pada penggunaan isu agama dalam ranah Pilkada, seperti yang terjadi di DKI pada tahun 2017. Berbeda dengan studi-studi tersebut, artikel ini mengkaji penggunaan identitas etnik dalam Pilkada serentak di Provinsi Papua pada tahun 2018. Tujuan yang bersifat konseptual dari penelitian ini adalah sejauh mana penggunaan politik identitas dalam pilkada di Papua memperkuat atau memperlemah tata kelola pemerintahan dan ketahanan orang asli Papua pada masa mendatang. Sumber data dari penulisan artikel ini adalah pengamatan, wawancara, diskusi kelompok terpusat di Jayapura pada bulan Mei dan Juni 2018 serta studi pustaka. Argumen yang dibangun dalam artikel ini adalah politik identitas sudah melekat pada pengalaman orang Papua pada masa kolonial, Orde Baru, maupun Otonomi Khusus. Setelah Otonomi Khusus, identitas kesukuan menguat kembali mengalahkan ke-Papua-an dalam ranah baru politik lokal. Sebagai akibatnya, Pemilu lebih ditempatkan sebagai strategi dan siasat elit untuk memperebutkan sumber daya daripada membangun tata kelola pemerintahan dan meningkatkan ketahanan orang asli Papua.

Kata Kunci: Politik Identitas, Pemilihan Gubernur, Tata Kelola, Ketahanan, Integrasi Nasional.

KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK TIOM SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN LANNY JAYA

Yannice Luma Marnala Sitorus
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota – USTJ
nala_ustj2006@yahoo.co.id

Abstrak

Pembangunan di era otonomi khusus Papua bertujuan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dan sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan dalam pembangunan ini difokuskan pada sumber daya yang berasal dari luar Papua, terutama pada dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Sumber daya yang berasal dari dalam Papua, seperti modal sosial dan budaya orang asli Papua yang cenderung diabaikan. Setelah sembilan tahun pelaksanaan ternyata masih belum meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua khususnya di wilayah pegunungan tengah di Papua. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode kualitatif (analisa deskriptif). Studi dilakukan pada orang asli Papua di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, salah satu kabupaten di daerah pegunungan tengah. Hasil studi menunjukkan bahwa mulai ada perubahan sosial, budaya dan ekonomi orang asli Papua di Tiom setelah pembangunan yang intensif di sana atau sejak pemekaran Kabupaten Lanny Jaya dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008. Pada sisi lain orang asli Papua masih belum berada pada tingkat peradaban yang setara dengan kelompok masyarakat pendatang di sana.

Kata kunci: Orang Asli Papua, Sumber Daya, Peradaban

